

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan perlu kiranya untuk memahami pokok-pokok perkembangan, isu, tantangan serta prospeknya di masa depan. Tidak terkecuali pada perempuan di pedesaan. Pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus mengacu pada dasar-dasar pembangunan yakni peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil serta merata dan pengutamakan serta manfaat. Saat ini perencanaan pembangunan kesehatan telah lebih serius menggunakan pendekatan bawah atas, atas bawah, partisipatif dan teknokratik. Di samping juga pendekatan politis jelas untuk di acu (Rachmat, 2018: hlm 1).

Perempuan desa merupakan salah satu sumber daya manusia yakni kelompok *citizen* yang belum mendapat ruang dalam proses pembangunan yang semestinya. Hal ini diasumsikan karena proses pembangunan tidak bisa melepaskan diri dari *cultural based*, dasar budaya yang melandasi personalisasi pembangunan yang berkecenderungan patrilineal, dimana posisi perempuan sebagai obyek ketimbang subyek pembangunan. Ketimpangan gender terlihat dari peran-perannya yang masih belum beranjak, yang lebih banyak pada sektor privat maupun domestik.

Padaahal, gender menurut Mansour Fakih, (2020: hlm 4) merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Seringkali perempuan dipersepsikan lemah lembut, emosional, cantik atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun tidak sama dari satu kelas ke kelas lainnya, itu yang kemudian dikenal dengan konsepsi gender.

Begitu pun dengan perempuan dalam konteks kekuasaan di Cirebon Jawa Barat, sebagaimana secara umum dilukiskan oleh Septi Gumiandari (2020: hlm 53),

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berangkat dari realitas sejarah yang menempatkan perempuan pada wilayah yang apolitis, tidak strategis, tampak selalu termarginalkan dari ranah politik. Karena dalam lintasan praktek sejarah kekuasaan Islam masa lalu di tanah Cirebon, kemudian memarginalkan kaum perempuan dari ranah politik, maka wajar adanya bila dikaitkan dengan persoalan keagamaan, jumlah perempuan dalam dunia politik formal di daerah Cirebon pun menjadi sangat sedikit.

Banyak pula tradisi keagamaan yang menjadi suatu kebiasaan kultural, sangat berkaitan dengan aspek religiusitas. Di Cirebon terutama wilayah bagian Selatan, terdapat sebuah tradisi keagamaan bagi para perempuan yang masih dijalankan hingga saat ini sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Warga setempat menyebut tradisi sebagai *Nebus Weteng*, sebuah tradisi dalam kerangka memperingati tujuh bulan masa kehamilan. *Nebus Weteng* dikenal pula dengan nama lain *Wetengan*, *Tujuh Bulanan*, atau *Mitui*. Tradisi *Nebus Weteng* merupakan dari banyak rangkaian tradisi yang berhubungan dengan kehamilan seorang perempuan. Menurut catatan dari manuskrip Cirebon dengan judul *Serat Murtasiyah*, masa kehamilan seseorang diperingati pada tiap bulan, mulai memasuki usia kandungan satu bulan sampai dengan masa sembilan bulan. Ada lagi tradisi lain yang saat ini masih dipertahankan, misalnya saat anak perempuan datang haid pertama, orang tuanya kemudian membuat *sega punar*.

Sementara itu, pemisahan gender dalam ruang sudah dapat terlihat dari arsitektur tradisional keraton di Cirebon yang mencerminkan budaya patriarki yang memandang kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Budaya-budaya dan batasan gender tersebut juga terdapat dalam bentuk arsitektur dan penataan ruang Keraton (Kaputran dan Keputren) (Natasha, 2018).

Di sisi lain, upaya meningkatkan kesetaraan gender khususnya di desa, saat ini telah menjadi perhatian yang mendorong tumbuhnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan demi mencapai pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkeadilan gender di desa. Ini artinya bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan di Indonesia juga telah menunjukkan dinamikanya (Hariyono, 2020; Parawansa, 2016).

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Meskipun demikian, seperti pandangan Batliwala (2019), Agarwal (2001) dan Kabeer (1999), ketidaksetaraan gender acapkali disebabkan oleh struktur sosial politik yang telah tumbuh mengakar di suatu kelompok masyarakat, sehingga menjelma dalam model relasi kuasa yang akhirnya mengekang perempuan dalam bersuara serta membuat pilihan yang penting terkait kesejahteraan mereka. Menurut Batliwala (2019), struktur kuasa tersebut memiliki banyak variasi dalam berbagai sektor, konteks, serta berbagai dimensi kehidupan sosial yang menempuh waktu, ruang, serta juga bidang sosial, dan bagaimana dinamika kuasa perlu dipahami lewat berbagai realitas ini sehingga capaian perubahan dapat terwujud. Sedangkan Agarwal (2001) dalam penelitiannya menemukan berbagai bentuk partisipasi perempuan, terutama dalam pengambilan kebijakan di desa, serta lebih menekankan urgensinya terhadap partisipasi perempuan dalam ruang-ruang tersebut sehingga bisa membawa perubahan. Padahal pembangunan juga sangat membutuhkan partisipasi dari kelompok-kelompok perempuan terutama di garis paling depan yakni di pedesaan (Branch, 2011).

Ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu produk kebijakan yang memiliki implikasi signifikan bagi kesejahteraan para perempuan desa. UU ini juga telah membuka berbagai peluang dan kesempatan para perempuan untuk lebih berperan di dalam suatu struktur kewenangan yang bisa memengaruhi pengambilan suatu kebijakan pembangunan di desa. UU ini juga dipandang sebagai upaya ambisius pemerintah pusat dalam memberikan sebagian kewenangan pembangunan daerah kepada pemerintah desa, melalui penyaluran langsung dana pembangunan. Selain itu, implikasi dari hadirnya UU Desa ini juga memberi tekanan perlunya partisipasi masyarakat di dalam pengambilan suatu keputusan di desa, upaya untuk mengentaskan kemiskinan, yang didalamnya juga pentingnya peningkatan kesetaraan gender. Dalam kacamata lain, regulasi ini juga menggarisbawahi adanya pembagian peran serta tanggung jawab oleh berbagai otoritas desa dalam mengawasi berbagai aspek pembangunan desa, dan tidak kalah pentingnya proses pengambilan keputusan terkait pengalokasian atas Dana Desa, yakni lewat forum musyawarah desa (musdes) dan juga dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam UU Desa juga memiliki

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

potensi menjadi arah bagi pemerintah desa agar lebih respon menangkap berbagai aspirasi masyarakat lewat keaktifan sebagai warga negara dan kelembagaan yang lebih partisipatif (Antlöv et al., 2016). Lebih spesifik di dalam Pasal 4 UU Desa disebutkan bahwa tujuan dari pengaturan desa yakni memberikan pengakuan atas segala keberagaman yang dimiliki desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, serta untuk mengatasi adanya kesenjangan pembangunan nasional.

Dalam studi terdahulu, saat implementasi awal berlakunya UU Desa menunjukkan potret minimnya partisipasi masyarakat di dalam forum pengambilan kebijakan di desa, bahkan tidak semua rapat desa bersifat inklusif, dan perempuan cenderung lebih tidak dilibatkan di dalam forum musyawarah, baik pada tingkat dusun maupun desa, bila dibandingkan laki-laki (Syukri et al., 2014) (Dharmawan et al., 2018). Wajah perempuan desa menunjukkan hambatan-hambatan yang cukup fundamental dalam keikutsertaan dalam pembangunan di desa (Morgan, 2017). Dengan demikian, kondisi seperti ini akan membatasi pengaruh perempuan di dalam proses pengambilan suatu kebijakan dalam pembangunan di desa. Titi Darmi (2016) menyebutkan faktor yang dialami perempuan khususnya di pedesaan adalah (1) beban kerja perempuan yang berat dan jam kerja yang panjang, selain mengurus rumah tangga, perempuan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian keluarga; (2) partisipasi perempuan dalam proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa masih rendah dibandingkan laki-laki; (3) peluang untuk meningkatkan keterampilan masih lemah, misalnya di masyarakat pedesaan masih ada beberapa anak laki-laki yang lebih diutamakan.

Di sisi lain, saat ini terdapat kemajuan atas keikutsertaan kelompok perempuan dalam musyawarah pembangunan desa, sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Haryono (2020). Dalam penelitiannya disimpulkan, keterlibatan perempuan, kelompok rentan, dan marjinal di desa bisa dilihat melalui perannya pada forum musyawarah desa (Musdes), mereka berpartisipasi ikut memberikan masukan dan usulan terkait dengan pembangunan desa dan penataan ekonomi berbasis penghidupan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Pelly (2015) bahwa ada tiga faktor penentu keberhasilan

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

suatu pembangunan yakni (1) partisipasi sosial, (2) sikap terhadap mental, tekad, disiplin, dan (3) semangat (etos kerja) pada masyarakat. Oleh karena itu, tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kesempatan yang diberikan masyarakat, adanya kemauan masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Vianey et al., 2020).

Oleh karena itu, jika mengharapkan hadirnya kemajuan bagi bangsa Indonesia, maka kuncinya adalah kemajuan desa. Dengan begitu menurut Iskandar (2020: hlm 19) persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat di pedesaan bisa teratasi. Itu berarti bahwa sebagian besar tantangan bagi perjalanan pembangunan di Indonesia akan dapat terselesaikan. Desa merupakan sumber identifikasi masalah, desa mempunyai jumlah kemiskinan tertinggi, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan rendah, daya beli yang rendah serta tingkat pendidikan rendah dibanding dengan kota. Karena itulah guna memperbaiki pada sektor pembangunan manusia, memajukan tingkat ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat, serta dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, maka mulailah dari desa (Iskandar, 2020:20).

Di samping itu, pengembangan kualitas perempuan menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi suatu bangsa (Ambepitiya General Sir John & Ambepitiya, 2016). Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan bertujuan meningkatkan proporsi perempuan dalam pembangunan (Hubeis, 2010: hlm 93). Secara sederhana pembangunan dimaknai dari, oleh, dan untuk masyarakat (Theresia, 2015: hlm 4). Pembangunan harus diarahkan atau difokuskan pada masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu "*eco development*" yang tidak hanya ditujukan pada perubahan ekonomi semata, namun juga mencakup perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial-politik tertentu (Theresia, 2015: hlm 4).

Masalah utama yang menghambat upaya peningkatan kualitas perempuan adalah pendekatan pembangunan kita yang kurang memperhatikan kesetaraan serta keadilan gender. Di samping memang perempuan secara kodrati mempunyai fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria, seperti haid, hamil, melahirkan serta menyusui (Hubeis, 2010); yakni proses yang sangat menentukan derajat

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesehatan dirinya dan anak kandungnya. Ini mengindikasikan bahwa persoalan yang melingkupi perempuan merupakan masalah pokok dalam kesejahteraan rakyat serta kependudukan di Indonesia (Parawansa, 2016).

Partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan bukan semata dipandang sebagai bagian dari proses, tetapi juga dapat dimaknai sebagai bagian dari tujuan, dimana peran serta masyarakat melalui partisipasi merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan terutama dalam program pembangunan di desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri (Pamuji, 2017).

Selain didasarkan karena adanya UU tentang Desa, *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendorong desa untuk mempertajam perspektif gender dalam pembangunan yakni membedakan kebutuhan praktis dan strategis perempuan (Moser, 1993), membedakan *women's concerns* dan *women's issues* (Alfirdaus, 2019), dan pentingnya “representasi”, hingga pada akhirnya pendekatan partisipasi “siapa”, “dalam hal apa”, dan “mengapa” perempuan terlibat menjadi penting (Cornwall, 2008). Dengan kata lain perempuan perlu mendapat ruang atau kesempatan sehingga memungkinkan mereka dapat mengekspresikan pengalaman, kebutuhan dan pendapat mereka masing-masing.

Ruang yang dimaksud dapat dimanfaatkan dengan baik bila telah tumbuh kesadaran serta kemampuan para perempuan. Dari sinilah peran pendidikan menjadi penting, untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdaya, bersaing dan mampu hidup mandiri. Dimana pendidikan dipandang sebagai upaya menciptakan peraturan dan ketentuan yang memenuhi kebutuhan setiap manusia. Tidak ada orang yang ingin menjalani kehidupan yang sulit, bingung, dan tidak bahagia. Pendidikan dipahami sebagai upaya mewujudkan hati nurani, tanggung jawab, dan kesadaran akan norma sehingga perilaku mencerminkan kesesuaian kehidupan emosional (Komar, 2006: hlm 26).

Pendidikan bersifat “mandiri” dalam arti fleksibel, membuka ruang dialog dan mendorong partisipasi. Dan dalam pendidikan masyarakat, lebih banyak

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perhatian diberikan pada "pembebasan" mereka yang kurang beruntung secara pendidikan, terpinggirkan, didiskriminasi dan menderita bentuk ketidakadilan lainnya (Sudiapermana, 2021: hlm 15). Pendidikan masyarakat tidak semata ditujukan mengubah sikap individu di masyarakat, namun ditujukan terjadinya perubahan pola perilaku kolektif antara kelompok dan masyarakat, di dalamnya termasuk perubahan sosial yang lebih luas. Pendidikan masyarakat tidak semata ditujukan untuk memberikan pendidikan di masyarakat, namun juga tentang menawarkan keadilan sosial (Sudiapermana, 2021: hlm 44).

Peran perempuan dalam turut serta merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di desa merupakan strategi yang akan menjadi pegangan untuk melihat relasi kuasa antara pemberi manfaat dengan penerima manfaat yang terjadi khususnya di desa penelitian, yakni Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Desa Sampiran sendiri berada sekitar 5 km dari pusat ibukota Kabupaten Cirebon, memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Keteringgalan sangat terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat dan kemiskinan yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran akan kesehatan reproduksi perempuan. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 30 persen kepala keluarga tidak mengenyam bangku sekolah dasar. Lebih dari 40 persen rumah tangga masih tergolong miskin dan berisiko miskin. Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber air bersih, sehingga masyarakat desa biasanya mandi, mencuci dan menggunakan jamban di sungai, termasuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Mereka aktif di sungai, mengabaikan ancaman infeksi pada organ reproduksinya yang belum pulih. Desa ini juga memiliki persoalan kesehatan reproduksi yang cukup serius, di mana sejumlah warga menderita tumor dan kanker organ reproduksi, yang kemudian menambah daftar panjang penyakit yang diderita masyarakat desa. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya kesehatan reproduksi perempuan juga diperparah dengan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan norma sosial yang semata menempatkan perempuan hanya sebatas obyek kekuasaan. Selain itu, gangguan kesehatan juga diperparah dengan terbatasnya akses warga terhadap sumber air bersih.

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Terlepas dari kendala tersebut, Desa Sampiran menyajikan situasi politik yang kondusif. Pсалnya, kuwu (kepala desa di Cirebon) sangat terbuka terhadap segala kemungkinan perubahan selama satu dekade terakhir (Rahmawati & Ulfa, 2020). UU No. 6 tentang Desa yang ditetapkan pada tahun 2014 telah mendorong dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa secara lebih partisipatif (Solekhan, 2014). Desa Sampiran pada 2017 lalu, telah menetapkan peraturan desa (perdes) tentang kesehatan reproduksi perempuan. Menurut Rahmawati & Ulfa (2020), Perdes No 07/2017 adalah pencapaian sangat berarti terhadap aksi kolektif perempuan di desa tersebut dalam advokasi yang menyertakan perempuan desa dalam proses perumusannya.

Selain turut berperan atas terbitnya perdes mengenai kesehatan reproduksi, melalui komunitas perempuan pada KWT dalam musyawarah desa mengusulkan penggunaan lahan kebun milik pemdes yang lebih strategis dan subur untuk memperkuat pangan gizi seimbang. Pemerintah Desa Sampiran telah menyetujui pemberian hak pakai lahan tanah aset desa kepada komunitas perempuan KWT desa tersebut. Perempuan Desa Sampiran juga berhasil mengubah waktu musyawarah desa menjadi sore hari, sehingga para perempuan lebih leluasa mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk memajukan kebutuhan perempuan.

Pilihan kepada perempuan di Desa Sampiran bukan tanpa alasan. Sesungguhnya perempuan desa, merupakan aktor dengan wajah ganda. Perempuan desa di satu pihak adalah entitas kelompok warga desa dengan potret sebagian besar miskin, dan rentan dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun, di pihak lain, perempuan desa juga merupakan kekuatan penyeimbang, yang juga dapat mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada perempuan, menyuarakan aspirasi, mengelola serta memanfaatkan sumber daya dalam rangka upaya mendukung kesetaraan pembangunan desa berbasis komunitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan tesis ini akan mengambil judul *“Partisipasi Perempuan Desa Dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus Aksi Kolektif Perempuan di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon).”*

Raji Supriyadi, 2023

**PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari uraian di atas, menunjukkan fenomena perempuan di Desa Sampiran telah menghadirkan pengaruh hingga lahirnya peraturan desa tentang kesehatan reproduksi perempuan. Khususnya sejak tahun 2014 mendapatkan dampingan dari Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Cirebon, kapasitas para perempuan di Desa Sampiran makin menguat. Hal tersebut dapat dilihat dari: (1) telah terbentuk kelompok-kelompok perempuan; (2) mendorong penerbitan perdes kesehatan reproduksi dengan menginisiasi isu kesehatan reproduksi perempuan serta ikut serta dalam kegiatan pelatihan penyusunan perdes; (3) juga telah terbentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengelola aset lahan desa; serta (4) representasi perempuan hadir dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) sehingga dapat memanfaatkan peluang bagi perempuan desa dapat berperan dalam rapat publik.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa yang menjadi faktor pendorong partisipasi perempuan dalam perumusan dan implementasi kebijakan peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Sampiran?
- 1.3.2 Bagaimana partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Sampiran?
- 1.3.3 Bagaimana bentuk-bentuk perubahan yang dialami perempuan di Desa Sampiran dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Menganalisis faktor yang mendorong partisipasi perempuan dalam perumusan dan implementasi kebijakan peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Sampiran.
- 1.4.2 Menganalisis partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan kesehatan reproduksi di Desa Sampiran.
- 1.4.3 Menganalisis bentuk-bentuk perubahan yang dialami perempuan di Desa Sampiran dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi.

Raji Supriyadi, 2023

*PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Masyarakat secara akademis dan ilmiah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat khususnya partisipasi perempuan di pedesaan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **1.5.2.1 Bagi lembaga**

Penelitian yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat mengembangkan secara ilmiah mengenai pentingnya partisipasi perempuan desa dalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan Pembangunan di desa.

#### **1.5.2.2 Bagi Peneliti**

Penelitian yang telah dilakukan ini menjadi salah satu cara belajar dan pengembangan dari keilmuan Pendidikan Masyarakat dari implementasi pemberdayaan perempuan di pedesaan.

## **1.6 Struktur Organisasi Tesis**

Sebagai upaya untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulisan tesis ini disusun dengan struktur sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan organisasi tesis.

BAB II : Kajian Pustaka, yang di dalamnya meliputi beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan judul dan penelitian relevan, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian, yang di dalamnya meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data dan triangulasi sumber data.

BAB IV : Temuan dan Pembahasan, yang di dalamnya meliputi pengolahan atau analisis data, pemaparan data kualitatif dan pembahasan data penelitian.

BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, yang di dalamnya meliputi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil temuan penelitian serta saran-saran dan rekomendasi.

Raji Supriyadi, 2023

*PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu